

PERS DAN PERUBAHAN SOSIAL DI SUMATERA BARAT AWAL ABAD KE-XX

Danil Mahmud Chaniago

Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: arsipku09@yahoo.co.id

Umi Rusmiani Humairah

Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: kabarumi@gmail.com

Abstract

The rise of the Indonesian national consciousness at the beginning of the 20th century coincided with the emergence and development of the press media of the bumiputera. At that time the bumiputera press had a very significant and strategic role in raising the spirit of nationalism (read: nationalism) Indonesia. The decisive role for the struggle for independence can at least be observed from the functioning of the media as a means of channeling the ideas of the movement of the movement. In addition, the bumiputera media is also a very effective and effective social agent.

Keywords: Press, Social Change, West Sumatra, Early 20th Century

Abstrak

Bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia pada awal abad ke-20 beriringan dengan muncul dan berkembangnya media pers kaum bumiputera. Pada masa itu pers bumiputera mempunyai peranan yang sangat signifikan dan strategis dalam membangkitkan semangat kebangsaan (baca: nasionalisme) Indonesia. Peranan yang sangat menentukan bagi perjuangan kemerdekaan itu setidaknya dapat dicermati dari berfungsinya media tersebut sebagai sarana menyalurkan ide-ide perjuangan kaum pergerakan. Selain itu, media kaum bumiputera ini juga menjadi social agent yang sangat ampuh dan efektif.

Kata Kunci: Pers, Perubahan Sosial, Sumatera Barat, Awal Abad ke-20

PENDAHULUAN

Bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia yang tergambar dari munculnya berbagai macam organisasi pergerakan nasional merupakan wujud nyata terjadinya perubahan sosial bangsa Indonesia pada awal abad ke duapuluh. Dalam sejarah Indonesia, bangkitnya kesadaran kebangsaan itu dikenal sebagai era Pergerakan Nasional.¹ Penting dicatat bahwa, media pers bumiputera tumbuh dan berkembang pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia tengah menggelora dan menjalar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Pada saat itu, media kaum bumiputera sangat diharapkan dapat menjadi tunas yang unggul dan mampu serta berani menjadi pembela kaum pribumi Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara muncul dan berkembangnya pers bumiputera dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Karena itu, benar apa yang dikemukakan Edward Cecil Smith² bahwa ada dukungan timbal balik dan perkembangan yang beriringan antara pers bumiputera dan bangkitnya nasionalisme Indonesia. Hal senada dilontarkan oleh Sartono Kartodirdjo. Menurut Sartono,³ pers

bumiputera dan pergerakan nasional merupakan dua bidang kegiatan Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan secara simbiotik; yang satu sukar mempertahankan eksistensinya tanpa yang lain.

Keterkaitan antara pers dengan bangkitnya rasa kebangsaan (nationalisme) juga dilontarkan oleh Benedict Anderson dalam bukunya *Imagine Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*.⁴ Dalam bukunya itu Ben melontarkan sebuah teori tentang asal-usul terbentuknya sebuah ikatan sosial bernama *nation*, yakni sebuah komunitas yang diangankan. Menurut Ben meski antar anggota bangsa tidak saling mengenal tapi mereka diikat oleh satu identitas yang terbangung. Jadi, kebangsaan dalam definisi Anderson adalah rasa kebersamaan atas pengorbanan. Monopoli penggunaan bahasa yang pada mulanya hanya terbatas pada komunitas elit menjadi runtuh ketika ditemukan alat cetak untuk menggandakan pesan-pesan tertulis. Surat kabar sebagai hasil dari teknologi penggandaan pesan dilihat Ben sebagai media yang dapat menumbuhkan kesadaran atas dunia imajinatif. Singkatnya, bagi Ben kesadaran kebangsaan diperluas dengan adanya surat kabar yang menjangkau berbagai komunitas masyarakat. Kapitalisme cetak pada gilirannya mampu menyeragamkan bahasa sebagai alas dasar bagi tumbuhnya nasionalisme.

PEMBAHASAN

Pers: Tinjauan Teoritis

Dalam perspektif ilmu komunikasi media pers merupakan bagian dari komunikasi khususnya komunikasi massa. Menurut Jalaludin Rahmat komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak

¹ Pergerakan nasional merupakan suatu fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Munculnya pergerakan nasional terkait erat dengan diterapkannya kebijakan baru oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke duapuluh. Dalam sejarah Indonesia kebijakan tersebut dikenal sebagai *Politik Etis* yaitu suatu kebijaksanaan politik Kolonial Belanda yang lebih memperhatikan "kepentingan Indonesia" dibanding masa-masa sebelumnya yang hanya mementingkan tuntutan ekonomi tanpa memperhitungkan kepentingan penduduk bumiputera. Lebih jauh mengenai *Politik Etis*, lihat dalam Robert Van Niel, *Munculnya Elit Moderen Indonesia*, terj. Zahara D. Noer, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984) h. 50-69.

² Edward Cecil Smith, *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*, terj. Atmakusumah, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).

³ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai*

Nasionalisme, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 116.

⁴ Benedict Anderson, *Imagine Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, (New York-London: Verso, 1983),

atau elektronik.⁵ Pers atau media massa sebagai salah satu instrument politik mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi khalayak terutama dalam membentuk opini publik. Sejatinya, dalam komunikasi politik media massa merupakan penggerak utama dalam upaya mempengaruhi perilaku individu terhadap berita yang diterimanya. Menurut Hasrullah,⁶ digunakannya media massa dalam proses politik tentu memiliki arti yang sangat penting. Bahkan dampak atau akibat dari penyebaran pesan terhadap khalayak akan sangat kuat apabila dilihat dari dampak penyebaran pesan tidak hanya sampai pada tahap kognitif dan afektif saja tetapi juga sampai pada tahap psikomotorik. Dengan kata lain, komunikasi politik melalui media massa merupakan salah satu aspek penting dalam melibatkan rakyat untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu bangsa. Dengan adanya potensi media maka rakyat merasakan manfaat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Pakar komunikasi massa, Jalaluddin Rahmat⁷ menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) karakteristik dalam peranan media massa. Ketiga hal tersebut adalah: *Pertama*, media massa mampu mendominasi lingkungan informasi dan berada di mana-mana. *Kedua*, komulasi pesan, perulangan pesan yang berkali-kali dapat memperkokoh dampak media massa. *Ketiga*, keseragaman wartawan, siaran berita mempunyai kecenderungan yang sama sehingga khalayak tidak mempunyai alternatif lain untuk memilih dan mengakibatkan terbentuk persepsi yang sama pula.

Dari perspektif teori masyarakat dan kekuasaan sebagaimana yang

dikemukakan Mc.Quail,⁸ media massa bukan saja sanggup membentuk dependensi warga masyarakat terhadap media dalam hal penciptaan opini, tetapi juga dalam hal penciptaan identitas dan kesadaran. Dalam konteks ini benar apa yang dikemukakan oleh Cutlip bahwa peristiwa-peristiwa yang bersifat luar biasa dapat menggeser opini publik seketika dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya.⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa opini publik yang selalu diasumsikan sebagai pertukaran pikiran secara luas dan bebas di media massa akan mampu melahirkan pikiran-pikiran yang jernih, demokratis, dan mengandung nilai-nilai kebenaran. Oleh karenanya dapat dimaklumi jika media massa selalu menjadi rebutan dan cenderung untuk digunakan oleh *interest group*, *pressure group*, partai politik, dan institusi-institusi politik lainnya. Dalam konteks ini benar apa yang dikemukakan oleh Eugene,¹⁰ bahwa media massa merupakan alat yang sangat efektif untuk mengontrol sistem politik terutama lagi mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Sebagai media komunikasi pers merupakan alat komunikasi yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pembentukan persepsi masyarakat tentang realitas sosial.¹¹ Pengaruh pemberitaan media tentang isu-isu rasial atau konflik sosial terhadap pembentukan persepsi khalayak cenderung lebih kuat pada isu-isu yang tergolong jauh dari pengalaman langsung seseorang. Sementara untuk isu-isu yang dekat dengan pengalaman pribadi seseorang pengaruh media tidak begitu kuat. Jadi, peranan dan pengaruh media

⁸ Dennis McQuail, *Mass Communication Theory* (Beverly Hills: Sage Publication, 1987), h. 82.

⁹Cutlip, *Effective Public Relation*, (Prentice Hall: New Jersey, 1971), h. 150-151.

¹⁰Kolb J.Eugene, *A Framework for Political Analysis* (New Jersey: Prentice Hall, 1978), h. 154-164.

¹¹ Hanna Adoni dan Sheril Mane, "Media and The Social Construction of Reality: Toward and Integration of Theory of Research", *Communication Research*, vol.II, Beverly Hill: Sage Publications Inc., 1984, h. 326.

⁵Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 189.

⁶ Hasrullah, "Pemberitaan Surat Kabar tentang Konflik Internal PDI dan Terpilihnya Megawati: Studi Komunikasi Politik terhadap Liputan Berita di Harian Kompas, Republika, dan Suara Karya", *Thesis* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996), h. 16.

⁷Jalaluddin, *Psikologi.....*, h. 191-193.

terhadap pembentukan persepsi publik tentang sesuatu realitas sosial tertentu lebih ditentukan juga oleh adanya dimensi jarak dari pengalaman seseorang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan menyebarkan pesan-pesan kepada khalayak, maka pers telah membentuk dirinya sebagai salah satu sistem sosial yang berpengaruh. Melalui media massa sebagian masyarakat mengetahui dan mengerti tentang kejadian sekitarnya.¹²

Pandangan pers terhadap peristiwa-peristiwa atau persoalan pada zamannya dalam kajian Ilmu sejarah digolongkan kepada *mentifact*.¹³ *Mentifact* adalah fakta yang bersifat mental karena merupakan pandangan, sikap, dan pendirian individu atau kelompok dalam menanggapi realitas sosialnya. Dalam hal ini *mentifact* perlu dibedakan dengan *fakta an sich* karena yang pertama itu merupakan gambaran, penilaian, dan pandangan yang bersifat konstruksi mental terhadap realitas sosial, sedangkan yang kedua merupakan bukti-bukti dan kenyataan sosial itu sendiri.

Paling tidak ada dua teori yang relevan dengan peranan pers bumiputera pada masa pergerakan nasional. Pertama, teori *media centerd* yang menyebutkan bahwa pers atau media merupakan institusi sosial yang memiliki kebebasan dan peluang yang besar untuk mengartikulasikan urgensi dan fungsi control sosialnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut dapat terwujud tatkala posisi dan peranan pemerintah masih lemah, termasuk dalam mengintervensi pers. Dalam kondisi seperti itu sering muncul kecenderungan-kecenderungan yang bersifat majemuk, bebas, dan fragmentatif dari suatu media pers dalam hal mengekspresikan

pandangan dan mengartikulasikan berbagai kepentingannya. Disertasi ini menunjukkan bahwa meskipun pers bumiputera sering dihadapi oleh berbagai tindakan-tindakan represif pemerintah kolonial terhadap pers, seperti *haatzai artikelen* dan *persbreidel ordonansi* namun pada masa itu pers bumiputera sebagai corong kaum pergerakan tetap leluasa dalam mengekspresikan dan mengartikulasikan kepentingan para redaktornya yang merupakan tokoh-tokoh pergerakan. Hal ini ditujukan terutama kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kedua, teori *state Centerd*. Dalam teori ini negara dipandang sebagai institusi yang memiliki otoritas kekuasaan yang besar, tampaknya berkewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakat termasuk pers sebagai institusi sosial. Hal ini terjadi tatkala posisi negara semakin menguat pasca konsolidasi kekuasaannya. Dalam hal ini yang muncul kemudian adalah kecenderungan yang bersifat seragam dan control dari pemerintah kepada pers agar tujuan dan fungsinya terpusat pada lembaga kekuasaan yang telah ada.¹⁴

Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat merupakan fenomena yang lazim karena manusia sebagai warga masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan-perubahan akan tampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tata kehidupan yang baru. Kehidupan suatu masyarakat sebelum momen tertentu dapat dibandingkan dengan kehidupan masyarakat sesudahnya. Perubahan itu sendiri pada prinsipnya merupakan suatu proses yang kontinyu. Artinya, bahwa setiap masyarakat pada kenyataan akan mengalami perubahan, tetapi perubahan antara masyarakat yang satu dengan yang lain tidak selalu sama. Ada masyarakat

¹²Lihat dalam Alex Ibnu Muridjal, "Agenda Media dan Agenda Publik: Studi tentang Agenda Tiga Surat kabar dan Agenda Publik Mahasiswa di Surakarta", *Tesis* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995), h. 28-29.

¹³ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 115-116.

¹⁴Dikutip dari Andi Suwirta, *Suara dari dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) 1945-1947*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 14-15.

yang mengalami perubahan lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam perubahan.¹⁵

Menurut Abdulsyani,¹⁶ perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau justru merupakan suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola kelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggungjawab, kepemimpinan, dan sebagainya. Bagi Selo Soemardjan perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok dalam masyarakat.¹⁷

Dinamika masyarakat atau perubahan masyarakat terjadi karena adanya beberapa unsur yang berinteraksi satu sama lain. Unsur-unsur itu di antaranya adalah: orientasi manusia terhadap situasi, prilaku yang mengadakan kegiatan dalam masyarakat, lambang dan sistem perlambangan yang mewujudkan komunikasi tentang bagaimana manusia ingin mencapai tujuannya. Selain itu juga terdapat unsur kegiatan sebagai hasil orientasi dan pengelolaan atau pemikiran prilaku tentang bagaimana mencapai cita-citanya. Dengan demikian suatu kegiatan merupakan realisasi dari motivasi dan karenanya selalu bersifat fungsional karena bertujuan mewujudkan kebutuhan.

Perubahan sosial selalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi terutama dalam masyarakat yang sedang berkembang

atau pada masyarakat yang sudah tergolong maju. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi pun tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, sebab antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada proses saling mempengaruhi secara timbal balik.¹⁸ Dengan kata lain, perubahan satu aspek langsung atau tidak langsung mempengaruhi aspek lain.¹⁹

Pada dasarnya perubahan sosial dapat terjadi karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan lingkungan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana kehidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru sehingga menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Ada tiga faktor penyebab utama dalam perubahan sosial yaitu penimbunan atau akumulasi sehingga melahirkan penemuan baru, laju pertumbuhan penduduk dan munculnya pertentangan. Tidak ada perubahan sosial yang berdiri sendiri sebab perubahan pada suatu aspek biasanya diikuti oleh atau sejalan dengan perubahan-perubahan aspek lainnya yang berhubungan.²⁰

Perubahan sosial dikehendaki atau diharapkan apabila bersumber dari individu atau kelompok yang mempunyai kehendak atau tujuan tertentu.²¹ Inilah yang terjadi pada bangsa Indonesia pada masa Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional adalah alasan untuk dapat terbebas dari belenggu kolonialisme. Karena para elit politik bumiputera berjuang secara bersama

¹⁸ Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), h. 34.

¹⁹ Wilbert E. Moore, *Social Change* (New York: Prentice Hall, 1963), h. 22.

²⁰ R.M. Mac Iver dan Ch.H. Page, *Society: An Introductory Analysis* (New York: Renhart, 1959), h. 49.

²¹ Amitai Etzioni dan Eva Etzioni, *Social Change: Source, Patterns, and Consequences* (New York: Basic Books, 1964), h. 358.

¹⁵ Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 133.

¹⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 162-164.

¹⁷ Dikutip dari Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 285.

untuk dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Dengan demikian perubahan masyarakat Indonesia yang terjadi adalah atas kehendak kaum elit politik atau yang dikenal dengan sebutan tokoh pergerakan. Oleh karena individu-individu yang menghendaki perubahan itu adalah para elit politik atau tokoh-tokoh pergerakan. Artinya perubahan sosial di Indonesia pada masa kolonial adalah berasal dari tokoh-tokoh pergerakan.

Dalam pengertian sederhana perubahan sosial selalu dikaitkan dengan faktor-faktor sebelum dan sesudah.²² Perubahan ini menurut Lauer,²³ merupakan perubahan penting dari struktur sosial yakni pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Dengan demikian, perubahan sosial adalah perubahan pada pola-pola perilaku dan interaksi sosial dan variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial serta modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku.

Menurut Smelser,²⁴ ada dua faktor pendorong percepatan perubahan sosial yakni potensi sumber daya manusia yaitu para pengusaha besar khususnya swasta asing, dan transportasi kereta api. Di antara kedua faktor itu transportasi kereta api yang syarat dengan unsur teknologi merupakan faktor penting pendorong percepatan perubahan. Teori ini relevan dengan yang terjadi di Indonesia pada masa kolonial. Perubahan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial merupakan dampak tidak langsung dari diperkenalkannya alat cetak pada awal abad ke-17 oleh para pengusaha dan misionaris Eropa. Dari industri percetakan ini kemudian lahir berbagai surat kabar baik yang diterbitkan oleh orang-orang Eropa, Tionghoa Peranakan maupun Bumiputera. Penyebaran surat kabar semakin cepat dan menjangkau banyak tempat sejak adanya modernisasi di bidang transportasi yang

ditandai dengan dijadikannya kereta api sebagai alat transportasi umum pada pertengahan abad ke-19. Berita-berita mengenai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa lain yang didapat dari surat kabar telah menyadarkan penduduk Hindia Belanda khususnya kalangan bumiputera akan arti penting kemajuan. Berita-berita tentang perkembangan-perkembangan dunia luar yang kemudian dijadikan sebagai pelajaran untuk mencapai kemajuan.

Perubahan sosial dapat digolongkan kepada dua bagian yakni perubahan yang disengaja (*cantact cange/intended change*) dan perubahan yang tidak disengaja (*unintended change/imanen change*). Perubahan yang pertama merupakan perubahan yang bersumber dari luar masyarakat baik yang disengaja melalui *agent of change* mamupun secara spontan di komunikasi oleh pihak-pihak dari luar masyarakat. Sementara itu, perubahan yang tidak disengaja merupakan perubahan sosial yang terjadi karena kehendak atau dinamika masyarakat yang bersangkutan sendiri tanpa pengaruh dari luar.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat bumiputera di pada masa kolonial yang ditandai dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia (baca: Pergerakan Nasional) awal abad ke-20, merupakan perubahan yang bersifat *intended change* yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan terbebas dari belenggu penjajahan. Perubahan tersebut merupakan akibat tidak langsung dari diterapkannya *politik etis* oleh pemerintah kolonial. Di antara pokok-pokok pikiran dalam kebijakan yang disebut sebagai hutang budi pemerintah kolonial kepada bangsa Indonesia itu adalah memberi kesempatan yang lebih luas kepada rakyat bumiputera untuk menikmati pendidikan. Konsekuensi logisnya adalah dalam waktu yang tidak begitu lama muncul kalangan elit berpendidikan Barat yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka inilah yang memelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dengan senjata atau aksi-aksi perlawanan fisik

²² Wilbert E. Moore, *Social....*, h. 22.

²³ Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, terj. Alimandan (Jakarta: Bina Aksara, 1994), h. 4.

²⁴ Niel J. Smelser, *Sociology* (Englewood Cliff, New York: Prentice Hall, 1986), h. 31.

lainnya, tetapi dengan kemampuan intelektual.

Masyarakat menurut Durkheim dapat digolongkan kepada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Golongan yang pertama mementingkan kesadaran sosial di antara individu. Kesadaran kemiripan dan keterpaduan, nilai yang dianut adalah nilai kolektif. Tindakan masyarakat membaur yang bertujuan mempertahankan kepaduan sosial, sedangkan dalam masyarakat solidaritas organik mementingkan kebebasan dan kemerdekaan individu, pembagian kerja dan spesialisasi nilai yang dianut adalah nilai pribadi, tindakan masyarakat menyebar, yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan individu.²⁵

Pengamatan Parson menunjukkan bahwa perubahan sosial dimulai dengan terjadinya diferensiasi sosial yang meningkat dari unit-unit sistem ke dalam pola ketergantungan fungsional. Kemudian diikuti dengan pembentukan mekanisme dan prinsip yang baru dan berakhir dengan terjadinya peningkatan adaptif dari masing-masing sistem terhadap lingkungan yang mereka hadapi. Dengan kata lain perubahan dimulai dengan terjadinya perbedaan-perbedaan pekerjaan, kepemilikan, pandangan, hubungan sosial dan lain-lain. Kemudian diikuti oleh mekanisme aturan baru yang mengikat mereka. Pada akhirnya tiap orang atau kelompok mempunyai kapasitas penyesuaian masing-masing terhadap lingkungannya.²⁶ Selain itu, Parsons juga membuat karakteristik perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern sebagai suatu dikotomi. Ini berdasarkan atas karakteristik-karakteristik yang tampak di masyarakat, yakni difusi dalam masyarakat tradisional melawan spesifikasi dalam masyarakat moderen; sifat kolektif dalam masyarakat tradisional melawan individualisme dalam masyarakat moderen; partikularisme dalam masyarakat

tradisional melawan universalisme dalam masyarakat moderen.²⁷

Jika teori Parsons tadi dikaitkan dengan perubahan sosial suatu komunitas Indonesia, maka yang menyebabkan perubahan sosial adalah adanya pertukaran informasi atau energi antara individu atau antara komunitas dalam suatu sistem. Adanya migrasi penduduk asing pada masa Kolonial di Hindia Belanda maka terjadi pertukaran informasi antara penduduk asli dan para migran itu. Pertukaran ini pada gilirannya menuntut rakyat bumiputera untuk selalu menyesuaikan diri terhadap sistem-sistem yang baru. Dengan kata lain, diferensiasi sosial dapat memicu munculnya pergeseran nilai, dan perubahan independensi yang semuanya akan meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri yang pada gilirannya menuju integrasi baru. Baik bangsa Indonesia maupun bangsa asing lainnya tentu berusaha untuk bertahan dalam sistem yang baru tadi, yakni sistem hidup perkotaan.

Perubahan suatu komunitas masyarakat dapat ditelusuri melalui perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat moderen. Dalam proses perubahannya menjadi masyarakat moderen maka di dalam masyarakat sendiri mengalami beberapa hal. *Pertama*, ketegangan-ketegangan antara nilai-nilai lama Dengan nilai-nilai moderen. *Kedua*, terjadi anomie dalam masyarakat. *Ketiga*, terjadi disorganisasi di mana organisasi atau lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat terdahulu mulai retak atau bubar. Dengan kata lain terjadi konflik yang nyata. Konflik tersebut sesungguhnya berfungsi bagi integrasi baru. Dengan kata lain dalam tahap perubahan masyarakat dari tradisional ke masyarakat moderen terjadi diferensiasi dan kemudian terjadi reintegrasi yang baru. Diferensiasi terjadi antara lain pada pandangan hidup dan hubungan sosial. Selain itu terjadi pula perubahan dalam struktur pekerjaan yang menimbulkan elit-elit baru dalam masyarakat tersebut. Elit baru tersebut

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), h. 35.

²⁶ Dikutip dari Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Belmont, Calif: Wadsworth Publishing Co, 1991), h. 67.

²⁷ Eva Etzioni dan Halevy, *Social Change* (London-New York: Routledge & Kegan Paul, 1987), h. 37.

muncul karena pendidikan, prestasi, keuletan, dan perjuangan membebaskan diri dari keterbelakangan.²⁸

Selain terjadi diferensiasi sosial dalam bentuk masyarakat bipolar (tradisional vs Moderen), maka perubahan sosial dalam bentuk pembangunan masyarakat juga sebagai usaha menciptakan nilai-nilai baru dalam bentuk nilai-nilai moderen dan independensi sosial. Lalu apa ciri-ciri masyarakat moderen dan tradisional? Menurut Mc Clelland dan Alex Inkeles,²⁹ manusia moderen mempunyai beberapa ciri yakni mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi dan terbuka terhadap pengalaman baru serta memiliki sikap semakin independent terhadap ikatan keluarga, ikatan suku, serta percaya terhadap ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk menundukkan alam semesta. Manusia moderen mempunyai pandangan mobilitas dan ambisi pekerjaan yang tinggi dan aktif dalam percaturan politik.

Untuk menganalisis perubahan sosial digunakan juga teori kebudayaan. Pengertian kebudayaan dalam konteks ini mengacu kepada pengertian kebudayaan menurut antropolog aliran idealisme seperti yang dikemukakan oleh Goodenough. Menurut Goodenough kebudayaan adalah sistem gagasan atau sistem kognitif dari suatu kelompok masyarakat yaitu suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berada dalam pikiran individu, anggota masyarakat, yang disusun sebagai pedoman dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan dan memilih alternatif yang ada.³⁰

Mengacu pada pengertian tadi, maka perubahan kebudayaan suatu masyarakat dipahami sebagai perubahan pada tataran ideasional, pada sistem gagasan atau sistem kognitif yakni pada aspek pengetahuan, nilai-nilai dan norma-

norma yang dianut masyarakat bersangkutan. Perubahan pada tataran ideasional akan membawa pada perubahan pola-pola perilaku, interaksi sosial, tindakan-tindakan, dan perubahan-perubahan itu akan menimbulkan perubahan sosial. Karena itu, mempelajari perubahan kebudayaan suatu masyarakat dapat dilakukan dengan mempelajari perubahan sosial yakni perubahan pada pola-pola perilaku dan interaksi sosial anggota masyarakat bersangkutan, karena perilaku dan tindakan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem kognitif; perilaku dan tindakan adalah konsekuensi logis dari sistem gagasan sebagai pedoman hidup yang terdiri dari sistem pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai itu. Perubahan kebudayaan dapat terjadi melalui proses akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Akulturasi merupakan proses yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan asli.³¹

Pers dan Bangkitnya Kesadaran Kebangsaan

Menjelang abad ke duapuluh banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia yang ketika itu masih bernama Hindia Belanda. Perubahan-perubahan itu menurut catatan Adam³² umumnya lebih diketahui oleh sebagian kecil rakyat bumiputera yakni kalangan elit tradisional yang melek huruf. Namun demikian

²⁸Eva Etzioni dan Halevy, *Social....*, h. 38.

²⁹Dikutip dari Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 26-32.

³⁰Robert H. Keesing, *Antropologi Budaya suatu Perspektif Kontemporer*, terj. Gunawan, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 68.

³¹Dikutip dari Gitrif Yunus, "Dari Uang Japutan ke Uang Dapua: Suatu Kajian tentang Perkawinan dan Perubahan Sosial di Pariaman Sumatera Barat", *Tesis*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999) h. 24-36.

³²Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia Consciousness 1855-1913* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program Cornell University, 1995), h. 79.

manfaat perubahan itu dirasakan oleh hampir seluruh rakyat bumiputera. Perubahan-perubahan itu ditandai dengan adanya berbagai inovasi teknologi antara lain diperkenalkannya perangkat komunikasi yang lebih dikembangkan, pertumbuhan pusat-pusat kota³³ perluasan kawasan industri, perbankan, dan toko-toko yang menyediakan barang impor dari Eropa maupun negeri lainnya.³⁴ Inovasi tersebut merupakan isyarat bagi hadirnya sebuah dunia baru di Hindia Belanda. Inovasi-inovasi itu pada gilirannya mengarah kepada suatu proses transformasi kebudayaan.³⁵

Inovasi-inovasi yang disebut tadi terjadi pada berbagai bidang. Pada bidang transportasi terlihat dari industri galangan kapal *Djoewana* di Semarang yang berhasil

³³Menurut Sjoberg kehadiran suatu kehidupan masyarakat moderen ditandai dengan banyaknya penduduk yang menggunakan peralatan yang kompleks dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai keterampilan profesional untuk memproduksi barang-barang atau pelayanan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat Gideon Sjoberg, *Pre Industrial City Past and Present* (New York: The Free Press, 1966), h. 1-180.

³⁴Pada tahun 1878 di Surabaya, salah satu kota pelabuhan dan pusat industri perdagangan di Jawa, sudah dipasarkan mesin-mesin pompa yang diimpor dari Inggris yang digunakan dalam instalasi mesin-mesin pabrik-pabrik gula di Jawa. Importirnya adalah perusahaan-perusahaan milik Bangsa Eropa di Surabaya. Lebih lanjut tentang hal ini lihat umpamanya dalam Bedjo Riyanto, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), h. 170-171.

³⁵Sartono menyebut proses perubahan kebudayaan sebagai proses modernisasi. Faktor pemicu terjadinya proses tersebut antara lain pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, perkembangan lembaga pendidikan model Barat, pesatnya industrialisasi, pesatnya pembangunan sistem komunikasi moderen dan lain-lain. Lihat dalam Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), h. 166; juga dalam Bedjo, *Iklan Surat Kabar....*, h. 161-162.

memproduksi kapal-kapal mesin baik yang didisain oleh perusahaan tersebut maupun untuk memenuhi permintaan pemesan. Kapal-kapal produk *Djoewana* itu bukan saja kapal untuk keperluan perdagangan tetapi juga untuk keperluan transportasi umum. Berkat adanya kapal laut maka penduduk Hindia Belanda dapat bepergian lebih cepat dan lebih jauh lagi. Kemajuan di bidang transportasi laut ini juga ditandai dengan didirikannya suatu perusahaan pelayaran negara yang menyelenggarakan rute pelayaran di wilayah Hindia Belanda hingga Singapura yang meliputi kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Maluku, dan Singapura. Modernisasi dalam jasa transportasi laut dengan penggunaan kapal-kapal mesin uap moderen, menurut Bedjo³⁶ tidak hanya mempercepat arus perdagangan internasional, industrialisasi, serta arus imigrasi penduduk dalam skala internasional, melainkan juga mempengaruhi transformasi dalam nilai-nilai spiritual atau keagamaan.

Keberadaan kapal laut semakin mempermudah, mempercepat, dan semakin mempermurah biaya perjalanan ibadah haji ke Mekkah. Pada gilirannya keberadaan kapal laut semakin memperbanyak jumlah haji di kalangan penduduk bumiputera; suatu hal yang sangat dicemaskan oleh pemerintah kolonial. Karena itu, pemerintah selalu berusaha menghambat laju kenaikan jumlah haji dengan berbagai macam aturan yang memberatkan. Akan tetapi, usaha itu tidak pernah berhasil. Catatan Deliar Noer³⁷ menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah jemaah haji justru semakin bertambah. Bahkan menjelang pergantian abad silam, terjadi pelonjakan yang sangat drastis. Jika pada tahun 1890 jumlah orang bumiputera yang naik haji hanya sekitar 7000 orang maka enam tahun kemudian jumlahnya mencapai tidak kurang dari 11.700 orang. Tentu saja bagi saudagar-saudagar Eropa

³⁶Bedjo, *Iklan Surat Kabar.....*, h. 173.

³⁷Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 30, lihat juga dalam Bedjo, *Iklan Surat Kabar.....*, h. 175.

khususnya pengusaha jasa transportasi laut, besarnya jumlah umat Islam yang mempunyai penghasilan cukup baik merupakan pangsa pasar yang sangat potensial untuk meraih laba lebih banyak lagi.

Simbol transportasi moderen lainnya bagi masyarakat di Hindia Belanda adalah dimulainya penggunaan kereta api sebagai sarana transportasi umum pada tahun 1863. Penggunaan kereta api sebagai transportasi umum didasarkan pada pertimbangan pemerintah bahwa transportasi darat yang dibangun sejak jaman Gubernur Jendral Deandels sudah tidak memadai lagi. Padahal sejak diterapkannya tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada tahun 1830 percepatan arus perdagangan hasil industri perkebunan sangat membutuhkan sarana transportasi darat yang lebih memadai lagi. Karena itulah, pada tahun 1863 pemerintah memberi lisensi kepada Poolman seorang pengusaha bidang transportasi, membuka trayek kereta api pertama yang menghubungkan kota Semarang dan Yogyakarta.³⁸ Keberhasilan transportasi yang dirintis Poolman itu pada gilirannya mendorong pemerintah memberikan kesempatan pada perusahaan swasta lainnya untuk membuka trayek kedua yang menghubungkan antara kota Batavia dan Bogor (Buitenzorg). Ternyata usaha transportasi pihak swasta itu mengalami kerugian sehingga pemerintah tidak mampu lagi membuka trayek-trayek baru. Akibatnya, usaha transportasi tersebut diambil alih pemerintah yang kemudian mendirikan perusahaan kereta api yang diberi nama Staatspoor Wegen pada tahun 1894. Pada tahun itu juga pemerintah membuka trayek untuk menghubungkan kota Batavia-Bogor-Yogyakarta-Surakarta-dan Surabaya. Pada tahun 1912 dibuka trayek dari Batavia-Cirebon-Semarang-dan Surabaya. Lima tahun kemudian dibuka lagi

trayek Batavia-Cirebon-Kroya-Yogyakarta-dan Surabaya.³⁹

Kereta api sebagai simbol kehidupan moderen juga diterima oleh kalangan elit bangsawan di Jawa. Upacara pembukaan stasiun kereta api pertama di Surakarta yang diberi nama Stasiun Balapan pada tahun 1866 dihadiri oleh berbagai kalangan elit tradisional, bahkan Susuhunan Paku Buwana IX ikut membukanya bersama Gubernur Jendral. Prosesi pernikahan keluarga Keraton Surakarta dengan keluarga Kesultanan Yogyakarta juga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengangkut rombongan mempelai pria dari Surakarta ke Yogyakarta. Digunakannya kereta api pada prosesi pernikahan itu menunjukkan bahwa kalangan elit bangsawan di kedua kerajaan itu telah menyerap unsur-unsur kebudayaan Barat dalam rangka penyamaan status sosial mereka dengan golongan penguasa.⁴⁰

Berkat adanya kapal laut dan kereta api sebagai sarana transportasi umum maka penyebaran atau sirkulasi surat kabar semakin mudah dan menjangkau ke berbagai tempat.⁴¹ Sejak itu penduduk Hindia Belanda semakin mudah mendapatkan informasi dan itu juga berarti proses perubahan sosial yang sedang terjadi dengan mudah dapat diikuti dan dirasakan oleh penduduk. Keberadaan kedua transportasi umum itu telah membuat penyebaran berita dan ide-ide baru melalui surat kabar menjadi lebih efisien. Sejak itu pertumbuhan surat kabar semakin meluas, tidak hanya di kalangan bangsa Eropa, dan Tionghoa Peranakan saja melainkan juga kalangan bumiputera.

³⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia.....*, h. 360-362; lihat juga dalam Bedjo, *Iklan Surat Kabar.....*, h. 176.

⁴⁰Lihat dalam Bedjo, *Iklan Surat Kabar.....*, h. 176.

⁴¹Catatan Elliot menunjukkan bahwa sampai pertengahan abad ke-19 Hindia Belanda diramaikan oleh terbitnya sekitar 30 surat kabar yang sebagian besarnya adalah pers kolonial. Elliot Parker, "Indonesia", dalam Kurian, *Wordl Press Encyclopaedia* (London: Mansell, 1982), h. 498.

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 360-362.

Selain itu, sejumlah inovasi teknik juga telah memungkinkan dilaksanakannya pemberitaan yang lebih akurat dan cepat. Hal tersebut ditandai dengan digunakannya telegraf pada tahun 1856 dan diperkenalkannya dinas post moderen antara Eropa dan Hindia Belanda.⁴² Inovasi di bidang informasi dan transformasi telah membuat dunia ini semakin kecil. Sejak itu dengan mudah penduduk Hindia Belanda dapat mengikuti perkembangan dunia luar berkat mudahnya orang mendapatkan surat kabar. Itu berarti semakin mendekatkan penduduk dengan kemajuan seperti yang sedang dialami masyarakat dunia lainnya.

Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh munculnya berbagai surat kabar dan media cetak lainnya merupakan buah dari tumbuhnya industri percetakan yang telah diperkenalkan oleh misionaris pada abad ke-17. Sejak berkenalan dengan alat cetak, Hindia Belanda dibanjiri oleh berbagai macam media pers baik yang diterbitkan oleh orang Eropa (Belanda), Tionghoa Peranakan, maupun bangsa Indonesia sendiri. Menurut Ignatius Haryanto,⁴³ pendiri dan direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), pertumbuhan dan perkembangan industri percetakan sebagai salah satu dampak dari adanya modernisasi transportasi sebenarnya agak terbalik dengan apa yang terjadi di negeri asalnya, daratan Eropa. Di sana selama ratusan tahun Gereja memiliki kuasa atas proses cetak-mencetak dan ketika mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg (Jerman) kalangan gereja menjadi kehilangan pamor dan kuasanya atas teks-teks. Sebaliknya di Nusantara kekuasaan para misionaris yang membawa dan memperkenalkan alat cetak menyebabkan kekuasaan VOC bisa tertandingi. Pada gilirannya pertumbuhan dan perkembangan alat cetak di Hindia Belanda ikut memicu munculnya kesadaran

baru pada masyarakat bumiputera di Nusantara. Bagi penduduk bumiputera pertumbuhan alat cetak itu telah mendorong munculnya kesadaran ke-Indonesiaan. Dengan kata lain industri percetakan yang kemudian melahirkan berbagai media pers bumiputera telah membangkitkan kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia.

Berbagai inovasi dan perkembangan sebagai yang disebut tadi mendapat perhatian besar dari kaum terpelajar bumiputera. Bagi para elit yang mendapat pendidikan Barat itu fenomena yang disebut tadi merupakan barometer perubahan atau apa yang kemudian dikenal sebagai kemajuan. Selain itu, kaum terpelajar bumiputera itu juga memandang bangsa Eropa di Hindia Belanda terutama orang-orang yang sukses dalam bidang ekonomi dan sosial adalah contoh nyata sukses material yang dibawa oleh kemajuan. Bahkan orang-orang Tionghoa Peranakan yang umumnya juga telah menikmati kesuksesan terutama di bidang ekonomi di pandang dengan rasa cemburu bercampur kagum. Apalagi menjelang tahun 1880-an, warga keturunan itu telah membuktikan keberhasilan mereka dalam bisnis persuratkabaran yang berguna untuk melayani kepentingan komunitas mereka. Kesuksesan yang diraih oleh bangsa Tionghoa Peranakan itu dipandang oleh kaum bumiputera sebagai keberhasilan warga keturunan itu dalam mencapai kemajuan. Pandangan-pandangan inilah yang kemudian menyadarkan kaum terpelajar bumiputera bahwa kemajuan telah dicapai apabila tidak lagi dipandang inferior terutama oleh kalangan bangsa Asing. Karena itu para intelektual bumiputera bertekad untuk mengejar kemajuan bagi Bangsa Indonesia supaya dipandang sebagai bangsa yang bermartabat. Untuk mencapainya, menurut kaum pelajar bumiputera itu, maka Bangsa Indonesia harus mendapat pengetahuan seluas mungkin melalui pendidikan model Barat.⁴⁴

⁴² Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Kasar: Pers Zaman Kolonial 1906-1942*, terj. Mien Joebhaar, (Jakarta: Hasta Mitra-KITLV, 2003), h. 39.

⁴³ Ignatius Haryanto, "Jejak Langkah Pers Indonesia", dalam *Kompas*, 4 Agustus 1996.

⁴⁴ Ahmat Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness 1855-1913*. (Ithaca, New York: Cornell University, 1995).h. 79-80.

Tekad kaum pelajar bumiputera untuk membawa Bangsa Indonesia ke gerbang kemajuan mendominasi isi tulisan dalam media pers menjelang akhir abad ke sembilanbelas. Dalam konteks ini artikel-artikel yang bertemakan pendidikan sebagai kunci kemajuan terlihat sangat menonjol. Tumbuhnya kesadaran bahwa jika kaum bumiputera ingin meraih kemajuan harus bersaing dengan bangsa lain, menyebabkan pendidikan menjadi topik diskusi yang sangat penting dalam setiap penerbitan media pers. Karena itu, wajar jika semangat untuk mendapat pendidikan model Barat sangat menggelora di kalangan penduduk bumiputera. Bahkan dalam jangka panjang seluruh pegawai yang ingin naik pangkat dalam birokrasi pribumi tidak hanya dilihat kemampuannya melainkan juga latar belakang pendidikannya.⁴⁵

Oleh karena terjadi krisis ekonomi pada akhir tahun 1880-an maka tingginya minat kaum bumiputera pada pendidikan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan krisis yang baru pulih kembali pada awal tahun 1890-an, mendorong pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran untuk sekolah anak-anak bumiputera. Akibatnya jumlah sekolah yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anak-anak bumiputera yang ingin mendapat pendidikan. Kondisi ini menimbulkan banyak protes dari kalangan bumiputera sebagaimana terlihat dari surat pembaca pada berbagai surat kabar.

Minimnya fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah tidak menghalangi penduduk bumiputera untuk mendapat pendidikan. Sebab lembaga pendidikan tradisional yang lebih dulu eksis seperti pesantren di Jawa, *surau* di Minangkabau, dan *meunasah* di Aceh tidak pernah absen memberi pelajaran membaca aksara Arab maupun ilmu-ilmu agama. Jadi, keberadaan institusi-institusi pendidikan tradisional itu sangat penting terutama untuk mengisi kekurangan sekolah pemerintah. Akan tetapi, institusi-institusi

keagamaan itu sangat jarang disebut dalam media pers.

Tumbuhnya perhatian terhadap pendidikan kaum bumiputera sebagaimana telah disebutkan pada gilirannya mendorong munculnya berbagai jurnal pendidikan. Upaya pertama menerbitkan jurnal untuk pendidikan untuk guru dan siswa dipelopori oleh Schuitemaker, kepala sekolah pada sekolah guru di Probolinggo yang menerbitkan jurnal *Soeloeh Pengadjar* pada awal tahun 1887. Guru-guru dari kalangan bumiputera di Semarang pada akhir abad ke sembilanbelas menerbitkan jurnal yang diberinama "Taman Pengajar". Penerbitan jurnal ini dipimpin oleh Vermeulen seorang guru Bantu pada sekolah guru di Yogyakarta. Melalui media ini secara intens guru-guru bumiputera mendiskusikan berbagai macam persoalan seperti pendidikan bagi kaum bumiputera, pelajaran Bahasa Belanda bagi rakyat bumiputera dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Kecuali itu, sering juga didiskusikan hal-hal yang lebih umum lagi seperti perubahan zaman dan modernisasi di antara kaum bumiputera.⁴⁶

Sementara itu, praktek *cultuurstelsel* yang mulai diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1830 mengguncangkan publik di negeri induk (baca: Belanda). Sebab praktek tersebut telah menyebabkan merosotnya kesejahteraan penduduk bumiputera khususnya di Jawa. Menjelang pergantian abad, Majelis Rendah Belanda disibukkan dengan perdebatan mengenai kemerosotan itu. Munculnya artikel yang berjudul "Een Eereschuld" di surat kabar *De Gids* pada Agustus 1899 semakin menghangatkan perdebatan. Artikel yang ditulis oleh van Deventer juga mengejutkan publik Belanda karena menyatakan bahwa Belanda mempunyai hutang yang cukup besar pada penduduk bumiputera di Hindia Belanda. Artikel itu juga membuktikan kemerosotan penduduk bumiputera akibat eksploitasi ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Karena itu, van Deventer ini meminta agar pemerintah Belanda segera membayar

⁴⁵Adam, *The Vernacular Press....*, h. 80.

⁴⁶Adam, *The Vernacular Press....*, h. 88.

hutang tersebut dengan cara meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk bumiputera melalui cara langkah baru dibidang ekonomi dan pendidikan. Selain itu, tulisan tokoh kaum Liberal di Majelis Rendah Belanda ini juga menyarankan agar pemerintah membuat sebuah kebijakan yang bisa melindungi hak-hak kaum bumiputera dan menyokong pembangunan moral dan material. Dengan kata lain, van Deventer menginginkan pemerintah Belanda di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina, segera menerapkan kebijakan politik di Hindia Belanda yang lebih memperhatikan kepentingan penduduk bumiputera dibanding masa sebelumnya yang hanya mementingkan tuntutan ekonomi tanpa memperhitungkan kepentingan penduduk bumiputera.⁴⁷

Tuntutan untuk perubahan bagi penduduk bumiputera itu akhirnya terwujud dengan munculnya suatu kebijakan baru pemerintah kolonial Hindia Belanda pada permulaan abad ke duapuluh. Dengan kebijakan baru ini pemerintah berusaha untuk merubah kebijakan politik mereka yang dipandang tidak konstruktif. Pemerintah menyebut kebijakan baru itu sebagai "hutang budi" kepada Bangsa Indonesia khususnya penduduk Jawa yang hidup dalam kemiskinan akibat *cultuurstelsel*. Statement Ratu Belanda, Wilhelmina yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Bulan September tahun 1901 dijadikan sebagai pijakan bagi berlakunya kebijakan baru itu. Pidato itu antara lain memuat pokok-pokok pikiran *de nieuwe koers* (arah baru) yang akan ditempuh oleh *de koloniale politiek* (politik jajahan) melalui kebijakan yang kemudian dikenal sebagai *Etische Politiek* (*Politik Etis*).⁴⁸ Konsekuensi logis

⁴⁷Kajian mendalam tentang hal ini lihat umpamanya dalam Robert van Niel, *Munculnya Elit Moderen....*, h. 50-69. Adam, *The Vernacular Press,*, h. 90, dan Lihat juga, dalam Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 32-36.

⁴⁸Sasaran utama *politik etis* adalah irigasi, transmigrasi dan edukasi. Ketiga sasaran ini dijalankan secara serempak dan tidak sedikit

dari kebijakan baru itu adalah, bahwa dalam waktu yang tidak begitu lama dari kalangan penduduk bumiputera muncul elit baru berpendidikan barat yang sadar akan harga dirinya dan merasa kecewa atas realitas yang sedang dihadapi dari situasi kolonial.⁴⁹

Para elit baru ini senantiasa berjuang untuk melenyapkan diskriminasi, ras, kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Sejak itu muncullah slogan "*Hindia Maju*" dan "*Kemajuan*". Slogan-slogan itu sering dimuat dalam majalah *Bintang Hindia* yang terbit di Belanda.⁵⁰ Kecuali itu, kaum elit yang kelak dikenal sebagai pelopor-pelopor pergerakan nasional ini semakin menyadari tanggungjawabnya guna mengangkat harkat dan martabat rakyat. Untuk itu mereka melakukan langkah-langkah pembaharuan yang ditujukan untuk melepaskan diri dari

anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankannya. Sejak itu pemerintah memperluas dan memperbanyak bangunan-bangunan irigasi dan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dilakukan transmigrasi. Banyak penduduk Jawa yang ditransmigrasikan ke Sumatera khususnya Lampung. Dalam bidang edukasi pemerintah memberi kesempatan yang lebih luas kepada rakyat bumiputera untuk menikmati pendidikan. Lebih jauh mengenai hal ini lihat umpamanya dalam Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoer Voor Inlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3S, 1985), h. 100; M.D. Mansoer (dkk.), *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhratara, 1970) h. 174, Ahmaddani G. Martha (et.al), *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), h. 2-3., dan Van Niel, *Munculnya Elit Moderen....*, h. 51.

⁴⁹R.Z.Leirissa, *Terwujudnya suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) h. 21.

⁵⁰Edisi perdana majalah yang diterbitkan oleh Brousson dan Abdul Riva'i ini terbit pada Juli 1902 oleh percetakan N.J. Boom di Amsterdam. Pimpinan majalah ini sebenarnya Brousson yang tetapi sebagian besar pekerjaan keredaksian dilakukan oleh Riva'i. Akan tetapi semua isi surat kabar ini dibawah wewenang Brousson. Dalam edisi perdana, Riva'i menulis bahwa majalah dwimingguan ini mempunyai tujuan yang mulia yakni memajukan pengetahuan rakyat bumiputera. Edisi terakhir *Bintang Hindia* terbit pada 15 Juni 1907. Lebih jauh mengenai media ini lihat Adam, *The Vernacular Press....*, h. 98-106.

penjajahan. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai macam organisasi pergerakan seperti Budi Utomo (1908) dan Sarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Indische - Party (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Nasional Indonesia (1927), dan lain-lain.

Pada awal kemunculannya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (BU) dan Sarikat Dagang Islam (SDI) belum melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan politik. SDI yang didirikan oleh Samanhudi menekankan kegiatannya pada usaha peningkatan ekonomi rakyat bumiputera sedangkan BU menegaskan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui bidang pendidikan. Bagi Badri Yatim, adanya kesadaran untuk bangkit memperbaiki nasib bangsa sudah merupakan benih nasionalisme dalam pengertian moderen.⁵¹ Meskipun bentuk nasionalisme yang pertama kali muncul di Indonesia tidak sepenuhnya dalam pengertian politik tetapi dalam sosial kemasyarakatan namun lahirnya organisasi-organisasi pergerakan itu merupakan fenomena nyata kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan bangsa Indonesia. Dalam sejarah nasional Indonesia fase ini dikenal sebagai era Pergerakan Nasional yaitu suatu pergerakan yang bertujuan untuk mengusir penjajah dan membangun sebuah *nation*.

Biasanya pembentukan sebuah *nation* selalu dihubungkan dengan adanya berbagai persamaan seperti bahasa, wilayah, sejarah dan, agama. Akan tetapi nasionalisme Indonesia tidaklah demikian, sebab tidak ada persamaan pada keempat unsur tersebut. Nasionalisme Indonesia lebih disebabkan oleh peristiwa sejarah, dalam hal ini penjajahan bangsa asing.⁵² Ernest Renan, menggambarkan bangsa serupa monumen yang memaratif kaya akan kenangan. Terutama kenangan akan

pengorbanan dan kesediaan untuk hidup dalam satu jiwa. Karena itu, bangsa dalam pandangan Renan dipupuk melalui beberapa propaganda-propoaganda yang serempak. Seperti Renan, kebangsaan dalam definisi Anderson⁵³ adalah rasa kebersamaan atas pengorbanan. Selain itu, kebangsaan juga dialasi oleh munculnya kapitalisme cetak yang menggusur bahasa sakral menjadi bahasa sekuler. Ikatan keagamaan dengan demikian tergantikan oleh solidaritas kebangsaan nasional. Kapitalisme cetak pada gilirannya juga mampu menyeragamkan bahasa sebagai alas dasar bagi tumbuhnya nasionalisme.

Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan Indonesia yang berwujud organisasi-organisasi pergerakan, maka pers bumiputera mulai mengelompokkan diri sesuai dengan aliran politik dan kecenderungan organisasinya. Dalam perkembangan berikutnya dapat disaksikan pers bumiputera menjadi organ pergerakan yang sangat efektif. Melalui media massanya organisasi-organisasi pergerakan dengan mudah mensosialisasikan ide-ide perjuangannya ke pengikut dan simpatisannya. Media pers pun dapat tersebar luas hingga ke berbagai daerah melalui jaringan organisasi. Pandangan ini semakin memperjelas bahwa pers mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan Indonesia. Pers dan pergerakan nasional merupakan dua kebutuhan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional yang tidak dapat dipisahkan.

Bangkitnya kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia seperti yang disebut di atas, dalam waktu singkat menjalar ke berbagai pelosok Nusantara, tidak kecuali Sumatera Barat yang masyarakatnya sangat terbuka untuk menerima ide-ide baru. Karena itu semangat nasionalisme masyarakat daerah

⁵¹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos, 1999), h. 18.

⁵² Leo Suryadinata, "Tjiri-Tjiri Chas Pergerakan Nasional Indonesia sebelum Perang", *Makalah Seminar Nasional II* 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta, h. 1.

⁵³ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism* (London, New York: Verso, 1983), 37-46, lihat juga www.wikimu.com dan www.melayuonline.com, diakses 23 Juni 2008.

ini berkembang dengan cepat.⁵⁴ Karena itu, ide-ide baru yang disebarakan melalui surat kabar, terutama tentang pergerakan nasional dalam waktu relatif singkat mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Barat. Dengan mengutip dan memberitakan aktifitas pergerakan nasional baik yang terjadi di Sumatera Barat maupun daerah lainnya merupakan bukti bahwa surat kabar memegang peranan penting dalam membangkitkan semangat kebangsaan orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan adanya berita-berita dan tulisan di media pers mengenai pergerakan kemerdekaan maka masyarakat Sumatera Barat semakin mengerti akan pentingnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain dari berita di surat kabar masyarakat Sumatera Barat memperoleh suatu pengertian mengenai suatu kejadian dan mereka dapat menyimpulkan sendiri mengenai berita itu, umpamanya berita tentang penangkapan tokoh-tokoh pergerakan. Pemerintah kolonial menyebutkan bahwa penangkapan itu dilakukan karena aktifitas tokoh-tokoh pergerakan itu dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi bagi rakyat Sumatera Barat, para tokoh pergerakan nasional itu adalah pemimpin-pemimpin yang berjuang untuk memperbaiki nasib bangsanya.

Sebagai suatu media massa, surat kabar berfungsi sebagai sumber informasi tentang situasi politik pergerakan menghadapi pemerintah kolonial. Lolosnya surat kabar sampai ke tangan rakyat berarti memberikan informasi yang berguna bagi rakyat. Begitu artinya media pers menjadikan banyak orang yang tidak berani membaca secara terbuka terutama di

kampung-kampung karena takut akan ancaman pejabat-pejabat pemerintah. Hal itu semakin menguatkan pendapat bahwa surat kabar ikut memegang peranan dalam membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, surat kabar tidak saja sebagai sumber informasi yang sangat berharga, tetapi juga sebagai juru bicara kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan banyaknya tulisan-tulisan yang menyangkut perjuangan kemerdekaan dalam berbagai media massa telah menjangkau pembaca khususnya kalangan bumiputera sehingga tidak sedikit di antara pembaca itu yang kemudian ikut bergabung menjadi pejuang kemerdekaan. Hal yang demikian terjadi di Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Sebagai suatu media massa, pers bumiputera pada masa pergerakan nasional berfungsi sebagai sumber informasi tentang situasi politik pergerakan menghadapi pemerintah kolonial. Lolosnya surat kabar sampai ke tangan rakyat berarti memberikan informasi yang berguna bagi rakyat. Begitu artinya media pers menjadikan banyak orang yang tidak berani membaca secara terbuka terutama di kampung-kampung karena takut akan ancaman pejabat-pejabat pemerintah. Hal itu semakin menguatkan pendapat bahwa surat kabar ikut memegang peranan dalam membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, surat kabar tidak saja sebagai sumber informasi yang sangat berharga, tetapi juga sebagai juru bicara kaum pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan banyaknya tulisan-tulisan yang menyangkut perjuangan kemerdekaan dalam berbagai media massa telah menjangkau pembaca khususnya kalangan bumiputera sehingga tidak sedikit di antara pembaca itu yang kemudian ikut bergabung menjadi pejuang kemerdekaan.

Pers bumiputera pada masa pergerakan nasional merupakan cerminan intelektual dan sangat efektif untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

⁵⁴ Cepatnya perkembangan

kesadaran kebangsaan di Sumatera Barat sesuai dengan falsafah hidup mereka yang mencintai tanah tumpah darahnya, sebagaimana tercermin dari salah satu adagium adat masyarakat setempat yang berbunyi : *tagak basuku mamaga suku, tagak banagari mamaga nagari, tagak babangso mamaga bangso*. Pepatah adat ini merupakan implementasi untuk mendukung gagasan semangat kebangsaan itu.

Pertumbuhan dan perkembangan pers bumiputera pada masa pergerakan nasional yang kemudian menjadi perpanjangan kaum pergerakan di Sumatera Barat telah mendorong bangkitnya semangat nasionalisme Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Dengan kata lain pers bumiputera telah berfungsi sebagai juru bicara kaum pergerakan nasional di Sumatera Barat dan berperan besar dalam melahirkan sebuah kesadaran politik nasional yang baru. Artinya, pers kaum bumiputera juga telah berfungsi sebagai sarana yang sangat ampuh dan efektif dalam menumbuhkan kesadaran nasional untuk mencapai cita-cita pergerakan nasional yakni terwujudnya sebuah *nation* Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Adam, Ahmat, 1995. *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia Consciousness 1855-1913*. Ithaca, New York: Southeast Asia Program Cornell University.
- Adoni, Hanna dan Sheril Mane, "Media and The Social Construction of Reality: Toward and Integration of Theory of Research", *Communication Research*, vol.II, Beverly Hill: Sage Pulications Inc, 1984.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London, New York: Verso, 1983.
- Cutlip, *Effective Public Relation*. Prentice Hall: New Jersey, 1971.
- Etzioni, Eva dan Halevy, *Social Change*. London-New York: Routledge & Kegan Paul, 1987.
- Etzioni, Amitai dan Eva Etzioni, *Social Change: Source, Patterns, and Consequences*. New York: Basic Books, 1964.
- Eugene, Kolb J., *A Framework for Political Analysis*. New Jersey: Prentice Hall, 1978.
- Hasrullah, "Pemberitaan Surat Kabar tentang Konflik Internal PDI dan Terpilihnya Megawati: Studi Komunikasi Politik terhadap Liputan Berita di Harian Kompas, Republika, dan Suara Karya", *Thesis*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996.
- Iver, R.M. Mac dan Ch.H.Page, *Society: An Introductory Analysis*. New York: Renhart, 1959.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Kartodirdjo, Sartono, *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Keesing, Robert H., *Antropologi Budaya suatu Perspektif Kontemporer*, terj. Gunawan. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Lauer, Robert H., *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, terj. Alimandan. Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Leirissa, R.Z., *Terwujudnya suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Mansoer, M.D., (dkk.), *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta; Bhratara, 1970.
- Martha, Ahmaddani G., (et.al.), *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Esa, 1985.
- Maters, Mirjam, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Kasar: Pers Zaman Kolonial 1906-1942*, terj. Mien Jobbhaar. Jakarta: Hasta Mitra-KITLV, 2003.

- Moore, Wilbert E., *Social Change*. New York: Prentice Hall, 1963.
- Muridjal, Alex Ibnu, "Agenda Media dan Agenda Publik: Studi tentang Agenda Tiga Surat kabar dan Agenda Publik Mahasiswa di Surakarta", *Tesis*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995.
- Niel, Robert Van, *Munculnya Elit Moderen Indonesia*, terj. Zahara D. Noer. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. Sartono Kartodirdjo 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Parker, Elliot, "Indonesia", dalam Kurian, *World Press Encyclopaedia*. London: Mansell, 1982.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Riyanto, Bedjo, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915*. Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia
- Sjoberg, Gideon, *Pre Industrial City Past and Present*. New York: The Free Press, 1966.
- Smelser, Niel J., *Sociology*. Englewood Cliff, New York: Prentice Hall, 1986
- Smith, Edwar Cecil, *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*, terj. Atmakusumah. Jakarta: Grafiti Pers
- Soekanto, Soerjono, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi, Selo *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda: Kantoer Voor Inlandsche Zaken*. Jakarta: LP3S, 1985.
- Suryadinata, Leo, "Tjiri-Tjiri Chas Pergerakan Nasional Indonesia sebelum Perang", *Makalah Seminar Nasional II 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta*, 1970.
- Suwarsono dan Alvin Y. So., *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Suwirta, Andi, *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) 1945-1947*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Taneko, Soleman B., *Struktur dan Proses Sosial suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Turner, Jonathan H., *The Structure of Sociological Theory*. Belmont, Calif: Wadsworth Publishing Co, 1991.
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos, 1999.
- Yunus, Gitrif, "Dari Uang Japutan ke Uang Dapua: Suatu Kajian tentang Perkawinan dan Perubahan Sosial di Pariaman Sumatera Barat". *Tesis*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.